

# GERAKAN LINGKUNGAN DI JAWA MASA KOLONIAL

Nawiyanto

Jurusan Sejarah Universitas Jember

[snawiyanto@gmail.com](mailto:snawiyanto@gmail.com)

---

## ABSTRACT

*This article discusses the genesis of the environmental movement in Java during the Dutch colonial era. A number of studies voicing the importance of environmental protection and environment-related local wisdoms have appeared. But, little has been done to uncover the question of how the environmental movement developed and consolidated itself in Java. The neglect of environmental movement dimension causes a failure to transform cultural wisdoms and academic findings into powerful corrective force, useless like "weapon without soldier". By employing a historical method, this article aims at elaborating the genesis of environmental movement in Java, issues that were taken into focus in the movement and its real achievements during the Dutch colonial era. The argument is built on the basis of Dutch historical material sources in various forms especially archival materials, official and organisational publications, and complementarily supported with relevant secondary sources. It is argued that the environmental movement in Java had European/Dutch elite as its major agent, evolved in line with the development of Western interests and understanding of colony functions in economic and non-economic terms, and made concrete achievements in legal, organizational-administrative, and practical terms.*

*Key words: environmental movement, colonial era, Java*

## ABSTRAK

*Sejumlah kajian yang menyoroti pentingnya pelestarian lingkungan dan nilai-nilai kearifan lokal terkait lingkungan memang banyak dihasilkan. Akan tetapi kajian-kajian yang ada belum secara sistematis mengkaji bagaimana gerakan lingkungan muncul dan mengkonsolidasi diri termasuk di Jawa. Diabaikannya dimensi gerakan lingkungan membuat nilai-nilai kearifan budaya dan temuan-temuan akademis terkait lingkungan sebagai "senjata tanpa tentara". Melalui penggunaan metode sejarah, tulisan ini bertujuan mengkaji munculnya gerakan lingkungan di Jawa, isu-isu yang menjadi fokus perhatian dan capaian-capaian yang diraih gerakan lingkungan di Jawa pada masa kolonial. Argumentasi tulisan dibangun dengan memanfaatkan terutama sumber-sumber Belanda dalam beragam rupa termasuk arsip, publikasi resmi dan organisasi. Diargumentasikan bahwa gerakan lingkungan di Jawa pada masa kolonial memperlihatkan elite Eropa/Belanda sebagai agensinya, berevolusi seiring dengan perkembangan kepentingan dan pemahaman Barat atas fungsi koloni secara ekonomi dan non-ekonomi, serta mempunyai capaian-capaian konkret dalam aspek legal, organisatoris-administratif, dan praktis.*

*Kata kunci: gerakan lingkungan, masa kolonial, Jawa,*

---

## PENDAHULUAN

Dalam perspektif historis jangka panjang, Pulau Jawa telah mengalami transformasi secara radikal dari wilayah jarang penduduk menjadi salah satu pulau yang paling padat penduduknya di dunia. Transformasi radikal tersebut

dari sudut pandang lanskap alam hadir dalam bentuk berkurangnya elemen lingkungan berupa vegetasi hutan. Secara umum abad ke-19 dapat dijadikan garis penanda. Sebelum abad ke-19 masih luasnya kawasan hutan dipandang sebagai masalah serius. Hal ini paralel dengan penggambaran hutan

sebagai wilayah yang angker dan berbahaya karena dihuni binatang buas dan roh-roh jahat yang membahayakan manusia. Gangguan binatang liar termasuk harimau dan babi hutan sering mengancam desa-desa di sekitarnya (Boomgaard, 2001:47) dan roh-roh jahat yang diyakini menjadi penghuni hutan dianggap sebagai sumber wabah penyakit (Winarsih, 1995:262).

Sejak akhir abad ke-19 hilangnya hutan dari banyak kawasan di Jawa dianggap sebagai ancaman serius karena menjadi sumber malapetaka. Kekhawatiran akan bencana yang mengancam akibat semakin berkurangnya kawasan hutan mendorong munculnya suara-suara yang menyerukan desakan kebutuhan perlindungan hutan di Jawa mengingat fungsi hidrologis, klimatologis dan orologis yang dimiliki vegetasi hutan mulai mengemuka (Van Goor dan Kartasubrata, 1982). Bukan hanya proses hilangnya hutan, kekhawatiran kemudian juga muncul atas berkurangnya populasi satwa liar yang menghuni hutan. Tidak mengherankan, pada tahun 1960-an bukan banyaknya populasi harimau yang dianggap menjadi masalah serius, melainkan justru sebaliknya terancam punahnya harimau Jawa sebagai kekayaan keragaman hayati yang banyak dikhawatirkan (Seidensticker dan Suyono, 1980).

Berkurangnya hutan dan populasi fauna yang ada di dalamnya, serta perluasan pemukiman manusia dan kepentingan-kepentingannya dengan jelas mengilustrasikan transformasi radikal yang terjadi di Jawa akibat proses-proses demografis dan sosio-ekonomis. Dapat dipastikan bahwa perubahan lingkungan yang terjadi mempunyai kaitan erat dengan permasalahan lingkungan yang dihadapi. Banjir besar yang menghantam Jember Selatan pada 1942, misalnya, diyakini terkait dengan deforestasi yang terjadi

di lereng tenggara kompleks Gunung Bromo pada masa sebelumnya (Soepardi, 1954:22). Banjir yang terjadi di berbagai tempat di Jawa pada awal tahun 1950-an termasuk yang melanda wilayah Krawang, Bojonegoro, Kediri dan Surabaya diyakini sebagian besar disebabkan oleh rusaknya hutan di daerah hulu Sungai Citarum, Bengawan Solo, dan Brantas (Soewardjo, 1953:219). Pandangan serupa dikemukakan Hoogerwerf (1953:288) berdasarkan observasi yang dilakukannya atas laporan-laporan surat kabar mengenai Jawa pada 1950-an yang menyuarakan tentang banjir yang lebih garang dan lebih sering terjadi akibat deforestasi.

Setelah lebih dari setengah abad memasuki era kemerdekaan, ancaman bencana terkait dengan deforestasi yang berlangsung di Jawa ternyata tidak menyurut. Bencana terkait berkurangnya hutan dan perubahan iklim diprediksi akan terus meningkat frekuensinya di Pulau Jawa (*Jawa Pos*, 5 Maret 2012). Terus berulangnya bencana dan krisis lingkungan dengan skala dan dampak yang semakin besar memunculkan kesan kuat bahwa keengganan belajar dari sejarah sebagai guru kehidupan dan reservoir kearifan. Belum ada komitmen kuat untuk mengambil langkah-langkah sistematis dan nyata untuk mengantisipasi dan mencegah berulangnya bencana. Bangsa ini cepat lupa akan kisah-kisah tragis dan memilukan akibat timpaan yang mendatangkan kerugian harta-benda maupun menelan korban jiwa. Kalaulah ada langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi bencana sifatnya masih fragmentaris dan asal-asalan sehingga terlalu kecil untuk dapat menjadi solusi efektif bagi kompleksitas masalah yang dihadapi. Kompleksitas masalah terus tumbuh seiring dengan penambahan jumlah penduduk dan tekanan sosial ekonomi yang mening-

kat.

Kekurangsigapan dalam mengantisipasi bencana juga membawa pada pandangan akan terjadinya krisis kesadaran lingkungan. Menurut Keraf (2010:79-84), krisis lingkungan yang tengah terjadi bersumber pada pendirian filosofis antroposentrisme yang menempatkan manusia di atas lingkungan sebagaimana ditemukan dalam pandangan Aristoteles dan para filsuf Barat. Kehadiran kolonialisme Barat di Jawa tidak jarang dipandang sebagai penyebab krisis lingkungan. Hal ini tampak misalnya dalam pandangan sejarawan lingkungan dari Belanda, Peter Boomgaard (1988:76), yang menyebut empat dekade kolonialisme Belanda di Jawa (1830-1870) atau yang populer disebut periode Sistem Tanam Paksa dalam kaitan dengan lingkungan hutan sebagai "*the age of destruction*" atau "Masa Penghancuran".

Berbagai kajian historis menunjukkan frekuensi yang tinggi menyangkut reaksi yang diberikan masyarakat Jawa terhadap kolonialisme Belanda. Perlawanan terhadap kolonialisme Belanda muncul silih-berganti di berbagai tempat di Jawa misalnya perlawanan yang dilakukan Sultan Ageng Tirtayasa, pangeran Diponegoro, Sultan Pangeran Mangkubumi, Pangeran Sambernyawa, Trunojoyo dan Untung Surapati (Poesponegoro & Notosusanto (ed), 1990:147-227). Dalam skala yang lebih kecil reaksi-reaksi terhadap kolonialisme terungkap dalam gerakan sosial lokal yang bersifat endemis. Gerakan sosial ini terutama muncul di daerah pedesaan yang menjadi sentra eksploitasi ekonomi kolonial. Bentuk gerakan sosial tersebut cukup bervariasi misalnya berupa gerakan anti pemerasan, gerakan mesianisme-millenarianisme, gerakan nativisme dan revivalisme. Sebuah gerakan sosial dapat menampilkan diri dengan

mengambil salah satu bentuk maupun merupakan campuran dari berbagai bentuk tersebut (Kartodirdjo, 1973). Pada masa pergerakan nasional, gerakan-gerakan sosial melawan kolonialisme marak terjadi di kawasan perkotaan, di antaranya dalam bentuk gerakan pemogokan.

Berlainan dengan reaksi politis terhadap kolonialisme yang kental mewarnai realitas sejarah dan historiografi Indonesia mengenai Jawa, reaksi terhadap krisis lingkungan tidak banyak diketahui dari kajian-kajian sejarah yang telah dilakukan. Hal ini menyadarkan akan kenyataan bahwa kajian historiografis di Indonesia cenderung menekankan dimensi horizontal, artinya meyoroti hubungan antar kelompok sosial khususnya kaum penjajah dan terjajah. Kajian historiografis yang lebih struktural sifatnya, yakni yang melihat relasi dan saling pengaruh antara manusia dengan lingkungannya belum mendapat perhatian akademis. Hal ini memberi indikasi tentang lemahnya gerakan lingkungan pada masa kolonial. Kajian-kajian akademis yang telah dilakukan lebih banyak berbicara mengenai gerakan lingkungan kontemporer (misal, Aditjondro, 2003; Alikodra, 2008; Lucas dan Jati, 2007). Kajian-kajian ini lemah akan wawasan historis dan mudah memunculkan bias bahwa krisis lingkungan baru muncul belakangan ini sebagai kesalahan Orde Baru atau Era Reformasi.

Memang beberapa tulisan dapat mengisi keterbatasan wawasan historis tentang gerakan lingkungan masa kolonial. Kontribusi kearah ini diberikan oleh Boomgaard (1999), Cribb (1988), dan Harto Yuwono (2013). Namun demikian, dengan fokus kajian yang berlingkup nasional dan bersifat garis besar (Hindia Belanda), dinamika gerakan lingkungan yang berlangsung di Jawa kurang mendapat tekanan serta

porsi pembahasan secara mendalam dan komprehensif. Juga tidak banyak diketahui bagaimana gagasan-gagasan ideal tentang pelestarian lingkungan diterjemahkan ke dalam gerakan dan aksi nyata, serta tantangan dan persoalan yang dihadapi di lapangan. Kumpulan abstrak yang dihimpun Van Goor dan Kartasubrata (1982) memberikan ikhtisar tentang tulisan-tulisan yang muncul jaman Belanda yang menyuarakan pentingnya perlindungan lingkungan. Selain menyuarakan gagasan Barat tentang lingkungan, tulisan-tulisan tersebut mengabaikan pandangan masyarakat Indonesia. Karya-karya tersebut juga tidak membahas bagaimana gagasan tentang pentingnya pelestarian lingkungan (hutan) ditransformasikan sebagai isu publik dan kemudian diperjuangkan dalam arena politik, demikian pula tidak banyak mengupas para eksponen gerakan dan lawan-lawannya.

Berdasarkan uraian di atas, pokok permasalahan yang hendak diangkat dalam tulisan ini adalah: (1) Bagaimanakah gerakan lingkungan muncul dan berkembang di Jawa pada masa kolonial dan kelompok eksponennya; (2) Apakah yang menjadi fokus gerakan lingkungan di Jawa masa kolonial dan capaian-capaian dari program kegiatan yang dilakukannya; (3) Mengapa gerakan lingkungan di Jawa pada masa kolonial lemah dan kurang populer dibanding dengan gerakan nasionalis.

Dengan mengkaji permasalahan ini, maka tulisan ini bertujuan untuk: (1) Mengkaji munculnya gerakan lingkungan di Jawa dengan mengungkap tokoh-tokoh yang terlibat di balik gerakan, cara-cara membangun kekuatan dan memobilisasi dukungan; (2) Meneliti isu yang dijadikan fokus perhatian dan capaian-capaian yang dapat diraih gerakan lingkungan di Ja-

wa; (3) Mengungkap kendala, permasalahan, dan musuh-musuh yang dihadapi gerakan lingkungan dalam membangun kekuatan maupun implementasi proyek-proyek konservasi lingkungan.

Analisis tulisan ini dibangun dengan menimba inspirasi teoretis dari teori-teori gerakan sosial yang banyak digeluti terutama di kalangan para ahli sosiologi. Secara teoretis gerakan sosial sering dibedakan menjadi dua kelompok besar, yakni gerakan lingkungan lama dan gerakan sosial baru (kontemporer). Pangkategorian ini dibuat dengan mempertimbangkan adanya ciri-ciri yang berbeda di antara keduanya menyangkut basis dukungan, orientasi ideologis gerakan, dan konteks kemunculannya. Perbedaan antara gerakan sosial lama dan baru dalam realitasnya memang tidaklah selalu bersifat tajam dan tegas, melainkan memperlihatkan adanya aspek-aspek yang berkesinambungan di antara keduanya (Pichardo, 1997:411-430). Namun demikian, secara idealistis-konseptual dikotomi ini hingga tingkat tertentu masih menawarkan bermanfaat dan berdaya jelas dalam memahami gerakan sosial, setidaknya dengan melihat tekanan yang diberikan dalam masing-masing gerakan.

Gerakan sosial lama pada umumnya berbasis kelas dan ideologi dengan fokus gerakan terarah pada isu redistribusi sumberdaya ekonomi, dan muncul dalam konteks masyarakat industri. Sementara itu, gerakan sosial baru mempunyai basis dukungan yang lebih luas, melintasi sekat-sekat kelas (Singh, 2010). Kebaruan dalam gerakan sosial baru ini juga tampak secara mencolok dalam isu-isu yang diangkatnya sebagai fokus gerakan, yang secara eksplisit kerap melekat dan menjadi atribut gerakan. Gerakan lingkungan termasuk dalam kategori gerakan sosial baru,

yang di dalamnya mewadahi pula gerakan feminis, gerakan perlindungan kelompok minoritas, gerakan perlindungan konsumen, dan berbagai gerakan lainnya. Dengan demikian, gerakan sosial baru lebih plural sifatnya karena mengangkat isu yang sangat beragam dan kemunculannya merupakan produk dari masyarakat pos-industri.

Dalam artikel ini gerakan lingkungan dipahami sebagai aktivitas yang dilakukan secara kolektif berdasar jaringan kelompok dan organisasi dengan orientasi pada cita-cita atau gagasan untuk mewujudkan struktur yang lebih berkeadilan khususnya terhadap lingkungan (Situmorang, 2013:12). Menurut konsepsi Habermas, munculnya gerakan lingkungan menampilkan diri sebagai respons terhadap krisis lingkungan yang parah dan mengancam dunia kehidupan akibat perkembangan tekno-ekonomis yang menekankan kepentingan materiel dan lepas dari nilai-nilai moral sebagai kendali (Zid, 2009:9-12; McCarthy, 2006). Dalam konteks masyarakat jajahan, gerakan lingkungan merupakan bagian dari ekspansi kolonial, berkembang melalui jaringan dan agensi barat yang ditumbuhkan oleh persepsi akan krisis lingkungan yang mengancam orde kolonial, dan menghadirkan diri sebagai "imperialisme hijau" (Grove, 1995). Konsepsi Grove ini memberi nuansa baru terhadap citra imperialisme, merevisi anggapan umum bahwa imperialisme secara keseluruhan destruktif dan merugikan karena merusak lingkungan koloni dan ekstraksi sumberdaya sangat eksploitatif.

Tulisan ini dipandang urgen baik karena pertimbangan kepentingan praktis maupun teoretis. Secara praktis kajian historis tentang gerakan lingkungan menawarkan kearifan sejarah yang dapat dipetik sebagai pelajaran berharga dalam mewujudkan kelestari-

an lingkungan sebagai impian manusia. Kearifan sejarah dapat dipetik baik dari kegagalan maupun keberhasilan dalam gerakan lingkungan pada masa lalu dengan memahami penjelasan di sebaliknya untuk dijadikan panduan dalam menjawab tantangan persoalan lingkungan masa kini dan masa depan. Dengan begitu sukses serupa dapat dicapai atau sebaliknya kegagalan dapat dihindari sehingga tidak terus berulang. Tulisan ini juga memberi pelajaran berharga bahwa kelestarian lingkungan harus diperjuangkan secara aktif, bukan keadaan yang terwujud begitu saja (*take it for granted*), yang ditentukan secara sewenang-wenang oleh takdir atau Dewi Fortuna dan terlepas sama sekali dari peran aktif manusia.

Dari sudut pandang teoretis, penelitian historis tentang gerakan lingkungan dapat memperluas horizon, tema dan teritori wilayah kajian sejarah. Kajian tentang gerakan lingkungan, seperti halnya aspek-aspek lingkungan lainnya termasuk perubahan dan permasalahan lingkungan, dapat mempercepat kooperasi antara sejarah dengan disiplin lain sehingga dapat meningkatkan daya eksplanasi sejarah. Penelitian ini juga dapat menjadi bagian dari upaya akademis mewujudkan apa yang disebut sejarawan Perancis March Bloch sebagai "*more human history*" atau sejarah yang lebih manusiawi (Bloch, 1976:v). March Bloch dan para penganut Aliran Annales lainnya menekankan bahwa masa lampau manusia tidak hanya menyangkut pemerintahan, perang, perebutan kekuasaan dan urusan politik lainnya, tetapi lebih kaya dari itu karena juga mengurus aspek-aspek lain, termasuk hubungan manusia dengan lingkungan tempat hidupnya. Bagi kajian-kajian dalam ranah ilmu lingkungan, penelitian ini memberi pemahaman vital tentang aspek diakronis gerakan lingkungan, bagaimana gerakan ling-

kungan berproses dan berevolusi pada masa colonial dan memperlihatkan belang merahnya dengan gerakan lingkungan yang lebih kontemporer.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan riset sejarah sehingga mengharuskan penggarapan subyek kajian berdasar prosedur baku dalam penelitian sejarah. Metode sejarah pada dasarnya meliputi empat tahapan kerja, yakni: (1) heuristik (pengumpulan sumber-sumber penulisan yang relevan dengan subyek garap), (2) kritik sumber (perlakuan kritis atas sumber-sumber yang terkumpul untuk menentukan otentisitas dan kredibilitas informasi untuk menjadi fakta-fakta sejarah), (3) interpretasi (mentransformasi fakta-fakta sejarah untuk menyusun argumentasi historis), dan (4) historiografi (menuangkan argumentasi sebagai sintesis dalam wujud narasi atau konstruksi sejarah) (Storey, 2011:77-78, Gottschalk, 1986:18). Sifat khas riset sejarah adalah penonjolan aspek diakronis. Artinya, riset ini mengupayakan penjelasan dan analisis dalam lingkup geografis terbatas, namun memanjang kerangka perkembangan waktu (Kuntowijoyo, 2008:5).

Argumentasi dalam tulisan ini dibangun berdasar sumber primer maupun sumber sekunder. Sumber primer yang diacu mencakup arsip yang ditulis para pejabat kolonial, laporan-laporan dan terbitan sejaman baik yang dikeluarkan pemerintah (*official publications*) maupun organisasi swasta (*private organisations*). Termasuk sumber yang dipakai dalam kategori ini antara lain adalah Laporan Kolonial (*Kolonial Verslagen*), Memori Serah Jabatan (*Memories van Overgave*) residen di Jawa, Laporan Komisi Penyelidikan Kemakmuran (*Onderzoek naar de Mindere*

*Welvaart*). Laporan yang dihasilkan oleh organisasi Masyarakat Hindia Belanda untuk Perlindungan Alam (*Verslag van de Nederlandsch Indische Vereeniging tot Natuurbescherming*), menyediakan informasi berharga mengenai isu-isu konservasi. Informasi juga digali dari berbagai terbitan masa kolonial termasuk diantaranya *Het Bosch*. Sumber sekunder yang dipakai untuk mendukung argumentasi tulisan ini adalah berbagai tulisan yang muncul pada masa pasca kolonial yang relevan dengan subyek yang dibahas. Termasuk dalam kategori ini diantaranya adalah kumpulan abstrak yang disunting oleh Van Goor dan Kartasubrata (1982) dengan judul, *Indonesian Forestry Abstract: Dutch Literature until about 1960* [Abstrak Kehutanan Indonesia: Literatur Belanda hingga Sekitar 1960], serta karya monomumental Tony Whitten, *et al.* (1996) yang berjudul *The Ecology of Java and Bali*.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kepentingan di Balik Gerakan

Gerakan lingkungan di Jawa mulai tumbuh sejak dekade-dekade terakhir abad ke-19, yang ditandai dengan adopsi kebijakan konservasi. Kekuatan yang melandasi adalah gagasan bahwa langkah-langkah khusus perlu diambil untuk melindungi kekayaan lingkungan Hindia Belanda dari kehilangan tak tergantikan dan kemunduran jangka panjang akibat proses-proses demografis dan sosio-ekonomis. Perkembangan ini memperlihatkan ciri-ciri yang secara jelas berbeda dengan praktik-praktik yang telah lama mapan yang mencadangkan bagian-bagian alam untuk para pemegang kekuasaan. Munculnya gerakan lingkungan di Jawa

merupakan bagian dari perkembangan global sebagai tanggapan atas kemunduran lingkungan alam dan satwa liar yang tengah berlangsung benua-benua lain. Dengan akar pemikiran Euro-Amerika, gagasan-gagasan konservasi meluas dan diadopsi dalam kebijakan kolonial dengan agensi kaum botanis dan ilmuwan alam lainnya, yang dengan jejaring ilmiah yang luas dan mapan mampu menciptakan rasa dan kepekaan akan krisis lingkungan (Grove, 1995:484-485).

Gerakan lingkungan di Jawa pada mulanya terkait erat dengan kepentingan dalam bidang pertanian. Kaitan ini dengan mudah dapat dicerna melalui maksud pemberlakuan peraturan-peraturan konservasi lingkungan khususnya sejak tahun 1870-an. Keputusan Pemerintah tahun 1873 dan Ordonansi Pembukaan Wilayah 1874 (*Ontginningsordonnantie van 1874*) yang mewajibkan orang-orang Eropa dan pribumi Indonesia yang menjalankan kegiatan pertanian di wilayah-wilayah miring untuk mengambil tindakan anti erosi. Ketetapan ini bersandar pada gagasan bahwa hasil pertanian dataran tinggi mengalami kemerosotan akibat penggerusan tanah-tanah subur menyusul hilangnya tutupan hutan. Terasering didorong untuk melindungi tanah dan memertahankan produksi pertanian, sebuah langkah yang sangat dianjurkan di Jawa oleh K.F. Holle, seorang ahli pertanian yang bekerja dalam administrasi kolonial dalam rangka mengatasi erosi. Melalui penggalan inspirasi yang berasal dari pengalaman kehancuran kesuburan tanah di Amerika yang disebabkan kegiatan pertanian, Holle menjadi tokoh pertama yang memperingatkan bahaya erosi yang berlangsung di Hindia Belanda khususnya Jawa (Holle, 1866:122-131)

Kaitan antara perlindungan ling-

kungan khususnya hutan pegunungan dengan kepentingan pertanian juga menemukan penekanan dalam pandangan A.J.M. Ledebouer (1934) dengan menunjuk secara khusus nasib usaha perkebunan dan pertanian di wilayah Karesidenan Besuki. Menurut Ledebouer, fungsi hidrologis hutan di dataran Tinggi Hyang mempengaruhi hidupnya perusahaan-perusahaan perkebunan tebu di Besuki dan Probolinggo, usaha pertanian tanaman pangan khususnya padi di daerah Kraksaan, Bondowoso, tidak terkecuali seluruh area penanaman padi di Jember, yang sekaligus juga sebagai area budidaya penanaman tembakau untuk pasar ekspor. Dengan fungsinya yang sangat vital, Ledebouer melihat pemertahanan hutan di Dataran Tinggi Hyang merupakan keharusan yang tidak dapat ditawar lagi.

Mengingat kaitan erat antara kepentingan pertanian dan perlindungan lingkungan, bukan hal yang mengejutkan bahwa penganjur utama perlindungan hutan penyangga tata air ditemukan di antara para insinyur yang bekerja dalam dinas pengairan kolonial. Sebagian dukungan memang juga berasal dari pegawai-pegawai yang bekerja pada dinas kehutanan seperti misalnya J.W.H. Cordes, S.P. Ham, A. de Jong dan G.S. de Graaf (Van Goor dan Kartasubrata, 1982). Dengan dukungan kedua kelompok profesi, maka kemudian lahirlah Ordonansi Kehutanan Tahun 1884, yang menetapkan preservasi hutan yang berfungsi sebagai pelindung tata air. Menurut peraturan ini, penebangan tidak diijinkan terhadap hutan pegunungan diatas 4.000 kaki di Jawa Tengah dan Timur (Boomgaard, 1999:262).

Gagasan yang melandasi ketetapan tersebut adalah untuk melindungi wilayah-wilayah tangkapan

air, sebuah tindakan rasional yang dianjurkan lebih awal oleh naturalis Jerman kenamaan, Franz Junghuhn untuk Jawa sekitar pertengahan abad ke-19 (Cribb, 1988:10). Ketetapan ini terkait erat dengan teori sepon (*sponge theory*), yang berpendapat tutupan hutan sebagai pengatur terbaik tata air (Potter, 2003:38). Perluasan pertanian ke arah puncak pegunungan yang tak terkendali dipandang sebagai ancaman serius terhadap keberadaan pertanian karena akan berdampak serius terhadap aliran air dan persediaan irigasi. Oleh karena itu, demi keberlanjutan pertanian, perluasan semacam ini seharusnya dihentikan dan untuk tujuan ini adanya kerangka hukum dipandang perlu untuk dibangun.

Selain upaya preservasi vegetasi hutan yang masih ada, gerakan lingkungan pada dekade-dekade akhir abad ke-19 juga diarahkan pada pemulihan kawasan hutan yang rusak. Pemerintah kolonial Belanda mulai tahun 1880-an telah mencanangkan program penghutanan kembali sebagai upaya mengurangi bencana terkait dengan rusaknya lingkungan hutan. Penghutanan kembali pada periode ini mempunyai motivasi berbeda dengan penanaman jati yang dilancarkan pada periode Tanam Paksa, sebagai upaya yang dilakukan lebih untuk kepentingan penjaminan tersedianya stok kayu jati, ketimbang untuk kepentingan perlindungan lingkungan. Penting untuk diingat bahwa kayu jati mempunyai arti yang sangat penting bagi Belanda sejak masa Kompeni (VOC). Selain untuk pembuatan bangunan kapal-kapal yang diperlukan Belanda dalam rangka pengangkutan komoditas perdagangan dari dan ke Hindia Belanda, kayu jati juga penting bagi Belanda untuk bangunan rumah, bantalan kereta api dan kayu bakar yang banyak diperlukan industri

perkebunan (Boomgaard, 1988:62-67).

Sejak sekitar tahun 1900 berkembang kecenderungan baru dalam gerakan lingkungan yang mengaitkan pemerliharaan dan perlindungan lingkungan demi alasan-alasan ilmiah dan estetik. Aktivis gerakan lingkungan dengan kecenderungan baru ini meyakini bahwa pentingnya perlindungan lingkungan alam tidak hanya terkait dengan nilai-nilai ekonomis, tetapi juga nilai-nilai ilmiah dan estetis. Semua nilai yang terkandung dalam lingkungan tersebut juga harus dijaga dan dilestarikan demi kepentingan generasi-generasi mendatang (Westermann, 1945:417). Berbeda dengan konservasi terdahulu, gerakan ini bertujuan melindungi flora dan fauna liar, serta lanskap alamiah atas dasar pertimbangan nilai-nilai estetis dan ilmu pengetahuan.

Kekhawatiran bahwa satwa liar tertentu dalam bahaya kepunahan memunculkan perlindungan binatang sebagai isu pertama untuk ditangani. Minat terhadap perlindungan satwa liar banyak dimotivasi oleh perburuan komersial yang marak terjadi atas burung-burung cinderawasih di luar Jawa, serta spesies lainnya seperti badak dan banteng di Pulau Jawa, untuk memenuhi permintaan pasar global akan barang-barang eksotis dan perkembangan mode. Keprihatinan atas tekanan perburuan komersial disuarakan di antaranya oleh P.J. van Houten dan M.C. Piepers pada 1890-an (Piepers, 1896:3-6, Boomgaard, 1999:264). Di samping ketakutan akan punahnya species, gerakan lingkungan dengan fokus konservasi dan perlindungan satwa juga diinspirasi oleh unsur-unsur yang ada dalam tradisi Barat seperti, keinginan untuk mempromosikan hak-hak binatang dan nilai-nilai utilitarian species binatang, misalnya burung untuk mengontrol



hama pertanian. Capaian legal pertama adalah pemberlakuan Ordonansi Perlindungan Satwa Liar Tahun 1909, yang memberikan perlindungan pada satwa liar, kecuali yang merugikan

### **Organisasi Gerakan dan Sepak Terjangnya**

Pada tahun 1910-an ada kemajuan bermakna dalam gerakan lingkungan di Jawa. Kejadian penting yang menandai adalah terbentuknya organisasi dan peraturan-peraturan perlindungan lingkungan alam. Pada 1912 organisasi pertama yang menangani konservasi lingkungan alam, Masyarakat Hindia Belanda untuk Perlindungan Alam (*Nederlandsch-Indische Vereeniging tot Natuurbescherming*) didirikan dengan botanis kehutanan Dr. S.H. Koorders yang bermukim di Bogor sebagai ketua (Van Steenis, 1939:150). Dalam laporan pertama organisasi ini disebutkan lebih detil tentang susunan pengurusnya. Wakil ketua organisasi ini diduduki oleh Teun Ottolander dari Banyuwangi dan P. Van der Haas dari Leiden, sedangkan bertindak sebagai sekretaris adalah Dr. C.H. Bernard (Leiden) dan Dr. K.W. Dammerman (Bogor), serta Mej. Joh. Ottolander (Banyuwangi) sebagai bendahara organisasi (*Nederlandsch-Indische Vereeniging*, 1914:1).

Organisasi ini memainkan peranan penting dalam memajukan gerakan lingkungan yang bersandar pada konservasi estetis dan ilmiah dan memberi kontribusi besar bagi kemajuan gerakan konservasi, baik dalam sisi legal maupun praktis (Eshuis, 1939:292). Membangkitkan kesadaran tentang pentingnya konservasi di Hindia Belanda adalah tugas luar biasa besar. Oleh karena itu, organisasi konservasi ini membangun kerjasama dengan organisasi lain seperti Perhimpunan Olahraga Gunung Hindia

Belanda (*Nederlandsch-Indische Vereeniging voor Bergsport*), yang lewat publikasinya mengambil peran aktif dalam mewartakan keelokan alam Jawa pada khlayak luas. Kontak erat juga dijalin dengan Perhimpunan Hindia Belanda untuk Sejarah Alam (*Nederlandsch-Indische Natuurhistorische Vereeniging*), yang menerbitkan bulletin *De Tropisch Natuur*. Kerjasama juga dijalin dengan Komisi Belanda Untuk Perlindungan Alam Internasional (*Nederlandsche Commissie voor Internationale Natuurbescherming*) (Verkorte Notulen, 1936:28-29).

Munculnya *Nederlandsch-Indische Vereeniging tot Natuurbescherming* memberi dorongan kuat bagi pemberlakuan peraturan perlindungan alam, yakni *Maatregelen ter Bescherming van de Natuurrijdommen in Nederlandsch-Indië van 1916* (Peraturan Perlindungan Kekayaan Alam di Hindia Belanda Tahun 1916). Peraturan ini memberi kerangka legal yang mengatur pembentukan cagar alam (Pluygers, 1952:40-41). Dengan mengecualikan tujuan-tujuan ilmiah yang diijinkan, di tempat-tempat ini intervensi manusia dalam bentuk apapun seperti pengambilan dan pengumpulan bibit tumbuhan, pemburuan satwa liar, penyalaan api, penggembalaan ternak dilarang sepenuhnya (Eshuis, 1939:299). Gagasan di balik larangan ini adalah keyakinan bahwa kehadiran kegiatan manusia di area-area tersebut akan membawa perubahan dan dapat menyebabkan kerusakan terhadap keadaan alam asli yang dipandang sangat bernilai dan akan dijaga untuk alasan-alasan estetis dan ilmiah. Perbaikan penting dilakukan dengan pemberlakuan *Natuurmonumenten en Wildreservatenordonnantie van 1932* (Peraturan Cagar Alam dan Suaka Margasatwa Tahun 1932). Dalam peraturan yang baru, intervensi

manusia ditoleransi hingga tingkat tertentu khususnya untuk kepentingan manajemen habitat. Peraturan ini memfasilitasi pembentukan suaka margasatwa yang luas cakupan geografisnya. Salah satu diantaranya adalah Suaka Margasatwa Baluran yang dibentuk pada tahun 1937 (Hoogerwerf, 1948:33-35).

Mengenai perlindungan satwa, sejumlah peraturan dikeluarkan. Perkembangan ini sebagian karena tekanan-tekanan dari luar khususnya dari Inggris dan Amerika Utara sebagai tujuan utama perdagangan produk binatang dari Hindia Belanda. Peraturan tersebut misalnya *Dierenbescherming-en Jachtordonnantie van 1924* (Ordonansi Pemburuan dan Perlindungan Binatang 1924. Diterapkan hanya untuk Jawa dan Madura, ordonansi ini berisi ketentuan berkenaan dengan pemberlakuan musim berburu yang dibatasi pada kurun waktu tertentu, keharusan pemilikan surat ijin yang diperoleh dari pihak berwajib dengan pembayaran fee, dan daftar spesies binatang yang dilindungi (Kiès, 1936). Peraturan tersebut direvisi dengan *Dierenbeschermings Verordening en Jachtordonnantie van 1931* (Peraturan Perlindungan Binatang dan Ordonansi Perburuan Tahun 1931). Selain mendaftar secara individual binatang-binatang yang dilindungi di Indonesia kolonial, sebuah ketentuan baru yang dituangkan di dalamnya adalah larangan menyeluruh atas perdagangan satwa yang dilindungi baik hidup atau mati, mengingat perlindungan yang tidak efektif tanpa larangan ekspor (Dammerman, 1929:4-5). Untuk mengatasi permasalahan yang terkait dengan peraturan yang berbeda antar satu wilayah dengan wilayah lainnya, pada 1932 diputuskan bahwa peraturan tahun 1931 diperlukan pemberlakuannya untuk seluruh

Indonesia (Kiès, 1936:18).

Selain melahirkan peraturan-peraturan yang mendukung perlindungan berbagai elemen lingkungan, capaian penting gerakan lingkungan di Jawa hadir dalam bentuk pembentukan lembaga yang menangani perlindungan lingkungan sebagai bagian dari birokrasi pemerintah. Pada awalnya tanggung jawab birokratis untuk persoalan konservasi masih kabur, sekalipun administrasi dan birokrasi pemerintah kolonial mengalami perkembangan pesat sejak paruh kedua abad ke-19. Sebagian alasannya adalah fakta bahwa perlindungan lingkungan sering saling terkait erat dan tidak dapat dikarantina secara mudah sebagai sebuah isu kebijakan semata. Meskipun perhatian terhadap konservasi tanah dan hutan telah muncul sejak dekade-dekade terakhir abad ke-19, tanggung jawab secara umum masih di tangan Jawatan Kehutanan. Sebagai salah satu jawatan di bawah Departemen Pertanian, Industri, dan Perdagangan, jawatan ini belum ada hingga 1897. Baru pada awal 1930-an diciptakanlah organ khusus dalam Jawatan Kehutanan untuk mengelola persoalan konservasi tanah dan hutan di Jawa dan Madura, yang dinamakan Komisi Reforestasi (*Bebossingcommissie*) dan Komisi Reboisasi Lokal (*Plaatselijke Reboisatie Commissie*). Komisi ini diisi oleh beberapa figur sebagai anggota, yakni H. Jelgerhuis Swildens, R.P. Soeroso, T.A. Kertoadiredjo, Van Werkum, W.Ch.L. Brocx, dan C.E. van Barre (*Verslag van de Reboisatie Commissie*, 1931:3).

Dalam wilayah perlindungan satwa liar dan alam, Volksraad sangat menganjurkan pemerintah menunjuk agen khusus untuk mengelola perlindungan alam, tetapi seruan ini ditolak karena alasan finansial. Dirumuskan dalam kongres pegawai tinggi kehutanan pada 1931, Mosi

Appelman meminta pengelolaan dan pengawasan suaka-suaka alam diserahkan kepada Jawatan Kehutanan. Seruan ini sebagian diterima dan diterjemahkan dalam Ordonansi Suaka Margasatwa dan Monumen Alam tahun 1932. Menurut ordonansi ini, suaka-suaka alam dalam wilayah hutan negara menjadi tanggung jawab Jawatan Kehutanan, tetapi yang berlokasi di luarnya dikelola oleh kepala-kepala pemerintahan setempat. Langkah birokratis penting kearah pengelolaan perlindungan alam diambil pada 1937 dengan penunjukan pegawai khusus dalam Kebun Raya untuk menangani persoalan konservasi alam. Posisi ini diciptakan lewat perjuangan panjang Direktur Kebun Raya, Komisi Belanda untuk Perlindungan Alam Internasional, dan Masyarakat Hindia Belanda untuk Perlindungan Alam. A. Hoogerwerf adalah orang pertama yang ditunjuk mengisi posisi birokrasi yang baru (*Korte Mededeelingen*, 1938:2, Rengers Hora Siccama, 1940:91).

Capaian lain yang lebih penting dalam tataran praktis adalah terbentuknya monumen alam baik cagar alam maupun suaka margasatwa di Jawa. Secara keseluruhan terdapat 45 monumen alam di Jawa pada masa kolonial Belanda. Dari jumlah ini penyebarannya secara lebih rinci berdasarkan wilayah karesidenan adalah sebagai berikut: Banten (2), Batavia (3), Priangan (13), Banyumas (3), Pekalongan (2), Semarang (4), Rembang (2), Madiun (2), Kediri (3), Pasuruan (3), dan Besuki (9). Secara total jumlah monumen alam di Jawa lebih banyak dibanding jumlah monumen alam di Sumatera sebanyak 8 buah, Sulawesi 3 buah, Maluku 1 buah, Sunda Kecil 1 buah, dan Irian 1 buah (Dammerman, 1918:3-6). Fakta ini mencerminkan realitas bahwa tekanan terhadap lingkungan alam di Jawa lebih besar

dibanding tempat lain di Indonesia sehingga kebutuhan perlindungan juga lebih banyak. Monumen alam terbesar di Jawa adalah Ujungkulon, Baluran, dan Jati Ikan-Purwo.

Keterlibatan swasta dalam manajemen cagar alam dan suaka margasatwa secara langsung pada masa kolonial masih terbatas. Meskipun Masyarakat Hindia Belanda untuk Perlindungan Alam berperan aktif dalam mengusulkan langkah-langkah konservasi lingkungan, pemerintah kolonial mengambil pengelolaan cagar alam dan suaka margasatwa dalam tangannya, ketimbang mempercayakan kepada organisasi swasta. Diargumentasikan bahwa pemerintah mempunyai hak manajemen karena cagar alam dan suaka margasatwa berlokasi di wilayah negara, dan tak satupun organisasi swasta dipandang mempunyai sumber daya untuk mengelola (Dammermann, 1938:23). Organisasi yang ada hanya dimintai peran sebagai penasihat dalam berbagai hal terkait dengan konservasi alam. Hal ini kontras dengan situasi di Belanda dimana organisasi swasta memainkan peran lebih kuat dibanding pemerintah. Suaka margasatwa yang dikelola oleh swasta hanya terdapat di Dataran Tinggi Hyang (Karesidenan Besuki) yang dikelola Ledebouer Bersaudara. Contoh lainnya adalah Suaka Margasatwa Cikepuh, di selatan Sukabumi (Jawa Barat), dikelola oleh organisasi pemburu, *Venatoria* (Hoogerwerf, 1953:290).

### **Elitisme Gerakan dan Isu Yang Tercecer**

Meskipun ada perluasan gagasan, gerakan lingkungan di Jawa pada masa kolonial Belanda mempunyai ciri yang relatif tidak berubah. Gerakan

lingkungan masih terbatas pada lingkaran-lingkaran pemerintah ketimbang rakyat kebanyakan. Ciri ini tercerminkan dalam fakta bahwa organisasi Masyarakat Hindia Belanda untuk Perlindungan Alam hampir secara eksklusif mewadahi orang-orang Eropa dengan sedikit kekecualian sejumlah aristokrat. Dalam struktur kepengurusan organisasi tampak bahwa dari 18 nama orang yang tercantum sebagai anggota organisasi, hanya ada satu nama orang Indonesia terdapat di dalamnya, yakni Pangeran Poerbo Atmodjo (Bupati Kutoarjo) (Nederlandsch-Indische Vereeniging, 1914:1). Hal ini sejalan dengan perkembangan sejarah sosial di Indonesia yang feodal saat itu. Keanggotaan organisasi adalah campuran orang dengan latar belakang yang berbeda-beda, seperti naturalis profesional yang bekerja pada sektor pemerintah, kelompok awam pecinta alam, pemburu dan pemilik perkebunan. Gerakan lingkungan di Jawa masih bersifat elitis dan terbatas anggota dan pendukungnya.

Pemberi donasi terhadap Masyarakat Hindia Belanda untuk Perlindungan Alam terdiri baik individu maupun korporasi. Dua korporasi Barat yang tercatat dalam laporan pertama organisasi (1914) memberi sumbangan besar, yakni Firma Carl Schlieper (perusahaan yang bergerak dalam peralatan tambang, pertanian, kereta api dan irigasi) dan *Koninklijk Paketvaart Maatschappij* (perusahaan pelayaran), yang masing-masing menyumbang f.231 dan f.100. Sumbangan dalam jumlah lebih kecil juga datang dari berbagai perusahaan perkebunan. Dari sekitar 423 nama individu dan korporasi yang memberi donasi dalam jumlah lebih kecil, terdapat 10 nama elite pribumi sebagai donatur, yakni M. Wiriasmita (Kuningan), R.M.T. Ario Tjokroadikoesoemo (Temanggung), M.

Tisnadibrata (Bogor), Tumenggung Ario Tjokroamidjojo (Pacitan), R.M. Soeradiningrat (Tangerang), R.M.T. Ario Poestokopranowo (Situbondo), M. Kartadjoemena (Bogor), R.A. Ario Djojogoro (Banyumas), R.A. Ario Brata Amidjaja (Kuningan), dan Raden Mas Abdulkadir (Tangerang) (Nederlandsch-Indische Vereeniging, 1914:2-18).

Gerakan lingkungan tampaknya sedikit menarik minat gerakan nasionalis meskipun manfaatnya tidak diragukan. Perwakilan orang Indonesia di Volksraad juga mendukung dengan suara bulat yang mendesak pemerintah untuk membuat suaka margasatwa dan melarang pemburuan dan perdagangan spesies satwa tertentu serta produk-produknya. Akan tetapi di antara organisasi nasionalis permasalahan konservasi secara praktis hampir tidak pernah disuarakan. Fokus utama perhatian mereka lebih diarahkan ke aspek-aspek sosio-ekonomis dan politis. Sebagai misal, pada tahun 1920-an Sarekat Islam dan organisasi-organisasi lain khususnya Sarekat Rakjat, yang mempunyai basis massa besar, lebih kuat menyuarakan dan mengusung permasalahan seperti sewa tanah, eksploitasi kapitalis, dan kondisi sosio-ekonomis kaum pekerja. Untuk kalangan orang Indonesia, konservasi lingkungan sangat dirasakan sebagai bagian dari penindasan kolonial, yang membatasi hak-hak mereka untuk memanfaatkan sumberdaya alam untuk kepentingan Belanda.

Sebagai ilustrasi dapat dilihat pada kasus yang terjadi di Jember. Pada tahun 1919 Sarekat Islam memrotes pemerintah menyangkut pemberian tanah-tanah Nogosaren dan Pontang Mandiku untuk perkebunan. Ketimbang menggunakan argumentasi perlindungan lingkungan sebagai dasar dalam aksi penolakan, protes diajukan dengan argumentasi bahwa pemerintah

kolonial sebelumnya telah menolak usulan serupa yang diajukan kalangan orang Indonesia yang bermaksud membuka lahan pertanian pada wilayah yang sama (*Memorie van Overgave Resident* H.A. Voet, 1922-1925:9-11). Tidak mengherankan kepentingan perlindungan lingkungan sering bertabrakan dengan kepentingan penghidupan orang-orang pribumi Indonesia. Dalam berbagai laporan kolonial disebutkan kasus-kasus pelanggaran terhadap keberadaan kawasan konservasi dalam bentuk perburuan, pengambilan hasil hutan, dan pemanfaatan lahan hutan untuk pertanian sering terkait dengan penduduk pribumi (*Memorie van Overgave*, H.A. Voet 1922-1925:74, Appelman, 1939:298; *Nederlandsch Indische Vereeniging*, 1932:39). Dari penggunaan sinilah sebenarnya ditemukan asal-usul pengkambinghitaman peladang berpindah sebagai perusak lingkungan. Secara praktis tidak ada gerakan lingkungan yang melibatkan massa besar. Fenomena ini berbeda dengan dukungan luas terhadap tujuan-tujuan politik gerakan nasionalis. Meskipun mempunyai penduduk sebagai potensi basis massa pendukung yang besar, gerakan lingkungan di Jawa belum muncul sebagai sebuah gerakan populer yang melibatkan massa dalam jumlah besar.

Gerakan lingkungan pada masa kolonial juga tidak banyak menaruh fokus pada isu polusi. Meskipun harus diakui bahwa polusi sungguh ada. Pada awal 1900-an, misalnya, industri gula di Panarukan dipersalahkan atas polusi Kali Sampean dengan limbah cair dan residu pabrik lainnya, yang mengakibatkan kematian ikan dan menurunnya hasil pertanian di lahan-lahan pertanian yang mendapat irigasi dari kali ini. Polusi yang diakibatkan operasi industri gula juga dianggap

bertanggungjawab terhadap panen yang buruk di beberapa tempat di Banyuwangi (*Onderzoek naar de Mindere Welvaart*, 7/14, 1908:43-44). Kurangnya perhatian terhadap masalah polusi tercermin dalam tanggapan dalam bentuk peraturan hukum. Satu-satunya peraturan mengenai polusi adalah *Ordonansi Gangguan 1926 (Hinderordonnantie)*. Sekalipun demikian, peraturan ini hampir tidak ditegakkan akibat ketiadaan kemauan politik dan ketetapan yang jelas mengenai jenis dan tingkatan polusi yang menyebabkan gangguan publik. Meskipun polusi sudah ada di Jawa bahkan sebelum 1870 (Nagtegaal, 1995), skala dan intensitasnya tampak belum dianggap memerlukan kerangka hukum yang mendesak. Baru sekitar tahun 1970 ketika industrialisasi yang berlangsung di Jawa khususnya kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya pada masa Orde Baru mulai menampilkan ancaman serius terhadap kondisi lingkungan, isu polusi mulai mencuat ke ruang publik dan menjadi urgen disoroti dalam gerakan lingkungan.

## SIMPULAN

Gerakan lingkungan di Jawa secara jelas memperlihatkan asal-usul dan akar-akar historis yang kuat pada masa kolonial. Gerakan lingkungan yang tumbuh di Jawa menunjukkan perluasan orientasi dari konservasi tata air dan tanah untuk kepentingan pertanian (ekonomi) kepada konservasi lingkungan demi kepentingan lingkungan sendiri, ilmu pengetahuan dan estetika, yang berbicara dengan mengatasnamakan kepentingan alam dan generasi-generasi mendatang. Fokus gerakan pun meluas dari perlindungan hutan dengan fungsi hidrologis ke aspek-aspek lain

khususnya kekayaan keragaman hayati baik satwa, fauna, maupun keelokan alam. Gerakan lingkungan di Jawa mendapatkan motor penggerak dari sekelompok rimbawan, insinyur irigasi, naturalis, pecinta alam Barat yang kemudian berafiliasi dalam organisasi bernama Masyarakat Hindia Belanda untuk Perlindungan Alam (*Nederlandsch-Indische Vereeniging tot Natuurbescherming*). Gerakan lingkungan di Jawa memperlihatkan kaitan yang erat dengan gerakan lingkungan global yang secara jelas tampak dari kerjasama yang terjalin secara internasional.

Gerakan lingkungan masa kolonial mengukirkan capaian-capaian konkret dari segi legal, administratif-birokratif, dan praktis. Secara legal di Hindia Belanda kemudian terbentuk kerangka hukum yang memayungi perlindungan monumen alam (cagar alam dan suaka margasatwa) yang selama masa kolonial terus diperbaiki untuk menutup berbagai kelemahan dan mengakomodasi perkembangan baru. Secara administratif-birokratis, gerakan lingkungan menghasilkan pembentukan organ pemerintahan yang secara khusus didevosikan untuk menangani perlindungan alam. Hal ini menghadirkan pemahaman baru bahwa pemerintah kolonial tidak hanya membatasi dengan urusan-urusan eksploitasi ekonomi dan pengejaran keuntungan. Dari segi praktis, gerakan lingkungan berhasil mendorong pemerintah meluncurkan proyek-proyek konservasi lingkungan dengan membentuk cagar alam dan suaka margasatwa yang tersebar di Jawa dari ujung barat hingga timur.

Meskipun tumbuh kurang lebih selama setengah abad terakhir masa kolonial Belanda, gerakan lingkungan di Jawa memperlihatkan sifat elitis, yakni terbatas pada lingkaran pemerintah

dengan dukungan populer yang terbatas. Organisasi pergerakan pada masa kolonial kurang berminat terhadap isu lingkungan dan tidak menjadikannya sebagai fokus utama gerakan. Muncul sebagai urusan negara, proyek-proyek konservasi kolonial yang diluncurkan oleh pemerintah lebih kuat menampilkan apa yang dibayangkan kaum konservasionis sebagai baik demi kepentingan rakyat, tetapi sering tidak dengan cara yang sama seperti yang rakyat sendiri bayangkan. Akibatnya, proyek-proyek konservasi kolonial dihadapkan pada kontes kekuasaan dan kemakmuran antara rakyat dan negara. Dalam perspektif pemerintah kolonial, rakyat sering menampilkan diri sebagai problem ketimbang solusi bagi pelestarian lingkungan. Bagaimana perubahan regim politik dari masa kolonial Belanda ke masa kemerdekaan secara dinamis mempengaruhi gerakan dan proyek konservasi lingkungan menjadi agenda yang menarik diteliti lebih lanjut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aditjondro, George Junus. 2003. *Pola-pola Gerakan Lingkungan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Alikodra, Hadi dkk. 2008. *Global Warming: Banjir dan Tragedi Pembalakan Hutan*. Jakarta: Nuansa.
- ANRI, "Memorie van Overgave van den aftredenden Resident van Besoeki, H.A. Voet, Agustus 1922-Mei 1925".
- Appelman, F.J. 1939. "Het Schiereiland Poerwo: Bosch en Wild in Java's Zuidoost-hoek", dalam C.G.G.J van Steenis (ed.), *3 Jaren Indisch Natuurleven*. Batavia: Nederlandsch-Indische Vereeniging tot Natuurbescherming.
- Boomgaard, Peter. 1988. "Forests and Forestry in Colonial Java: 1677-1942", dalam John Dargavel, Kay Dixon, dan Noel Semple (ed), *Changing Tropical Forests: Historical Perspectives on Today's Chal-*

- lenges in Asia, Australasia and Oceania. Canberra: Centre for Resource and Environmental Studies.
- Boomgaard, Peter. 1999. "Oriental Nature, its Friends and its Enemies: Conservation of Nature in Late-Colonial Indonesia", *Environment and History*, 5, 3.
- Boomgaard, Peter. 2001. *Frontiers of Fear: Tigers and People in the Malay World, 1600-1950*. New Haven: Yale University Press.
- Cribb, Robert. 1988. "The Politics of Environmental Protection in Indonesia", *Working Paper No. 48*, Clayton: Centre of Southeast Asian Studies Monash University.
- Dammerman, K.W. 1918. "Overzicht der Nederlandsch-Indische Natuurmonumenten", *Nederlandsch Indische Vereeniging tot Natuurbescherming*, Mededeeling No. 8.
- Dammerman, K.W. 1929. *Preservation of Wild Life and Nature Reserves in the Netherlands Indies*. Weltevreden: Emmink.
- Dammerman, K.W. 1938. "Preface", dalam Section of Nature Protection of the Gov. Botanic Gardens (ed.), *Nature Protection in the Netherlands Indies*. Batavia: the Department of Economic Affairs.
- Eshuis, W. 1939. "Protection of Wild Life in the Netherlands Indies", *Bulletin of the Colonial Institute of Amsterdam*.
- Gottschalk, Louis. 1986. *Mengerti Sejarah*. Jakarta: Penerbit UI.
- Grove, Richard. 1995. *Green Imperialism: Colonial Expansion, Tropical Island Edens and the Origins of Environmentalism, 1600-1860 (Studies in Environment and History)*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Holle, K.F. 1866. "Een Groot Gevaar dat Sluipend Nadert", *Tijdschrift voor Nijverheid en Landbouw in Nederlandsch Indie*, 12.
- Hoogerwerf, A. 1948. Hoogerwerf, A., "Het Wildreservaat Baloeran", *Tectona*, 38.
- Hoogerwerf, A. 1953. "Perlindungan Alam dan Pemburuan di Indonesia", *Almanak Pertanian 1953*. Djakarta: Badan Usaha Penerbit Almanak Pertanian.
- Hoogerwerf, A. 1954. "Perlindungan Alam dan Pemburuan di Indonesia", *Almanak Pertanian 1954*. Djakarta: Badan Usaha Penerbit Almanak Pertanian.
- Jawa Pos. 5 Maret 2012. "Jawa Bakal makin Sering Kena Bencana".
- Kartodirdjo, Sartono. 1973. *Protest Movements in Rural Java: a Study of Agrarian Unrest in the Nineteenth and Twentieth Centuries*. Singapore: Oxford University Press.
- Keraf, Sonny A. 2010. *Krisis dan bencana Lingkungan Hidup Global*. Yogyakarta: Kanisius.
- Kiès, C.H.M.H. 1936. "Nature Protection in the Netherlands Indies", in *Nature Protection in the Netherlands Indies*. Cambridge: Special Publication No. 8 of the American Committee for International Wild Life Protection.
- Korte Mededeelingen. 1938. *Korte Mededeelingen der Nederlandsch-Indische Vereeniging tot Natuurbescherming No. 4*.
- Kuntowijoyo. 2008. *Penjelasan Sejarah*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Ledeboer, A.J.M. 1934. *Natuurbescherming door Particulieren, het Jang-Plateau Oost-Java Nederlandsch-Indië*. Tanpa kota: tanpa penerbit.
- Lucas, Anton dan Arief W. Jati. 2007. "The Politics of Environmental and Water Pollution in East Jawa", Peter Boomgaard (ed.). *A World of Water: rain Rivers, and Seas in Southeast Asia*. Leiden: KITLV Press.
- McCarthy, Thomas. 2006. *Teori Kritis Jurgen Habermas*. Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Nagtegaal, Luc, 1995. "Urban Pollution in Java, 1600-1850", in Peter J.M. Nas (ed.), *Issues in Urban Development: Case Studies from Indonesia*, Leiden: CWNS.
- Nederlandsch Indische Vereeniging tot Natuurbescherming, *Verslag over de jaren 1929-1931*. Buitenzorg: Archipel.
- Nederlandsch Indische Vereeniging, *Nederlandsch-Indische Vereeniging tot Natuurbescherming: Eerste Jaarverslag over 1912-1913*. Batavia: G. Kolff.
- Onderzoek. 1908. *Onderzoek naar de Mindere Welvaart der Inlandsche Bevolking op Java en Madoera*, Vol. 7 (14): Samentrek-

- king van de Afdelingsverslagen over de Uitkomsten der Onderzoekingen naar de Irrigatie in de Residentie Besoeki. Batavia: Albrecht.
- Pichardo, Nelson A. "New Social Movements: A Critical Review". *Annual Review of Sociology*, Vol. 23.
- Piepers, M.C. 1896. "Door Welke Maatregelen kan tot eene Rationeele Bescherming der Inheemsche Dieren en Plantenwereld in Nederlandsch Indië Worden Gekomen?", *Tijdschrift voor Nederlandsch Indië*, 25, 1.
- Pluygers, Lucie A. 1952. *Natuurbescherming en Wildbeheer, Special met Betrekking tot Indonesië*, Djakarta: B. Wolters.
- Poesponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto (ed). 1990. *Sejarah Nasional Indonesia IV*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Potter, Lesley. 2003. "Forests versus Agriculture: Colonial Forest Services, Environmental Ideas and the Regulation of Land-use Change in Southeast Asia", in Lye Tuck-Po, Wil de Jong and Abe Ken-ichi (eds), *The Political Ecology of Tropical Forests in Southeast Asia: Historical Perspective*. Kyoto: Kyoto University.
- Rengers Hora Siccama, G.F.H.W. 1940. "Berichtgeving omtrent Natuurbescherming over 1936-1938: Onderwerpen van Algemeen Aard", *Het Bosch*, 7, 1.
- Seidensticker, John dan Suyono. 1980. *The Javan Tiger and the Meru Betiri Reserve: A Plan for Management*. Gland: International Union for Conservation of Nature and Natural Resources.
- Singh, Rajendra. 2010. *Gerakan Sosial Baru*. Yogyakarta: Resist Book.
- Situmorang, Abdul Wahib. 2013. *Dinamika Protes Kolektif Lingkungan Hidup di Indonesia, 1968-2011*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soepardi, R. 1954. *Hutan Reboisasi, Mempertinggi Kemakmuran*. Jakarta: Perpustakaan Perguruan Kementerian P.P. dan K.
- Soewardjo. 1953. "Pertanian Rakjat", *Almanak Pertanian 1953*.
- Storey, William Kelleher. 2011. *Menulis Sejarah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Van Goor, CP dan Junus Kartasubrata, et al., 1982. *Indonesian Forestry Abstracts: Dutch literature until about 1960*. Wageningen: Centre for Agricultural Publishing and Documentation.
- Van Steenis, C.G.G.J. 1939. "Natuurbescherming in Nederlands-Indië van Botanist Standpunt", *Natuurkundig Tijdschrift voor Nederlandsch-Indië*, 99.
- Verkorte Notulen. 1936. "Verkorte Notulen der vergaderingen van het Dagelijksch Bestuur", in *Natuur Bescherming in Indië Gedurende het Jaar 1935: Tiende Verslag van de Nederlandsh Indische Vereeniging tot Natuurbescherming*, Buitenzorg: Archipel.
- Verslag. 1931. *Verslag van de Reboisatie Commissie, Ingesteld door den Provinciaal Raad van Oost-Java*. Soerabaja: H. van Ingen.
- Westermann, J.H. 1945. "Wild Life Conservation in the Netherlands Empire, Its National and International Aspects", Pieter Honig and Frans Verdoorn (eds), *Science and Scientists in the Netherlands Indies*. New York City: Board for the Netherlands Indies, Surinam and Curaçao.
- Westermann, J.H. 1945. "Wild Life Conservation in the Netherlands Empire, Its National and International Aspects", in Pieter Honig and Frans Verdoorn (eds), *Science and Scientists in the Netherlands Indies*, New York City: Board for the Netherlands Indies, Surinam and Curaçao.
- Whitten, Tony et al. 1996. *The Ecology of Java and Bali*. Singapore: Periplus.
- Winarsih P.A. 1995. *Babad Blambangan*. Yogyakarta: Bentang and École Française de'Extrême Orient
- Yuwono, Harto. 2013. *Sejarah Konservasi Alam di Indonesia*. Tt: tp.
- Zid, Muhammad. 2009. "Menelusuri Pemikiran Habermas tentang Gerakan Lingkungan". *Region*, Vol. 1 No. 3.